

POLITIK PEMUSNAHAN DAN PEMUSNAHAN POLITIK

Telaah Kritis Atas Konsep Hannah Arendt Tentang Totalitarisme

Mathias Daven

"Pembunuh menghancurkan suatu kehidupan, tetapi dia tidak menghancurkan fakta adanya pembunuhan itu sendiri" (Hannah Arendt)

Abstract

If we wish to understand a totalitarian system as a whole, we need first to understand the central role of the concentration camp as a laboratorium to experiment in total domination. Arendt's analysis of totalitarianism in the twentieth century shows how a totalitarian regime cannot survive without terror; and terror will not be effective without concentration camps. Experiments in concentration camps had as their purpose, apart from wiping out any freedom or spontaneity, the abolishing of space between human beings, abolishing space for politics. Thus, totalitarianism did not mirror only the politics of extinction, but also the extinction of politics. As a way forward, Arendt analyses political theory that forces the reader to understand power no longer under the rubric of domination or violence – although this avenue is open – but rather under the rubric of freedom. Arendt is convinced that the life of a destroyed nation can be restored by mutual forgiveness and mutual promises, two abilities rooted in action. Political action, as with other acts, is identical with the ability to commence something new.

Kata-kata Kunci: Totalitarisme, antisemitisme, imperialisme, dominasi, teror, kebebasan, kedaulatan, kamp konsentrasi, politik, ideologi, tindakan.

Pengantar

Dominasi total atas manusia merupakan tujuan setiap usaha rezim totaliter. Sebagai suatu sistem politik yang melampaui bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional (kediktatoran atau tirani), totalitarisme secara sistematis melakukan eksperimen menyulap “kemajemukan dan perbedaan tiap makhluk manusia yang tak terbatas seolah-olah seluruh umat manusia persis seperti individu tunggal saja”.¹ Titik kulminasi dari dominasi total tersebut adalah apa yang terungkap dalam dua istilah populer, *Shoah* dan *Holocaust*,² yaitu suatu tragedi pemusnahan lebih dari enam juta warga Yahudi di seluruh daratan Eropa di bawah rezim totaliter Nazi-Hitler. Kekejian yang ekstrem bisa membuat orang tak percaya bahwa aksi itu menjadi salah satu kemungkinan sejarah. Kebencian terhadap Yahudi terdapat cukup luas di dunia, namun suatu usaha pemusnahan yang terorganisir terhadap warga Yahudi di dunia (-enam juta berhasil dibunuh) dengan cara amat keji tampaknya berada di luar kemampuan akal sehat untuk dipahami.

Sebagai filsuf politik keturunan Yahudi, yang biografinya amat terkait dengan kekejian totalitarisme Nazi-Hitler, Hannah Arendt memandang totalitarisme sebagai mesin pemusnah kebebasan dan politik. Kedua jenis totalitarisme, baik Bolshevisme (Rusia) dan Nasional-Sosialisme Jerman (Hitler) tidak segan-segan melanggar secara sistematis hak-hak dasar manusia dan bahkan menguasai kehidupan masyarakat sampai ke keyakinan-keyakinan pribadi. Bahkan kedua-duanya berhasil merekrut kaum “birokrat” yang disulap menjadi algojo-algojo yang merasa berkewajiban patuh total terhadap ideologi serta merasa bangga ketika mereka sukses melaksanakan perintah pemusnahan massal.

Dengan bertopang pada sistem teror-total, rezim totaliter tidak saja leluasa memusnahkan lawan politik sebagaimana diterapkan dalam sistem

1 Lihat Hannah Arendt, *Asal-Usul Totalitarisme, Jilid III: Totalitarisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hlm. 217

2 Istilah *Shoah* berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti bencana atau tragedi. Sedangkan istilah yang paling populer hingga saat ini, *Holocaust*, mengacu pada sejenis upacara korban bakar dalam konteks kebudayaan Yunani, di mana hewan korban dibakar seluruhnya sebagai tanda penghormatan dan persembahan kepada Dewa. Pemusnahan warga Yahudi dilakukan bukan dalam konteks ritus korban bakar dan tidak mempunyai makna religius apa pun. Lihat Alexander Brakel, *Der Holocaust. Judenverfolgung und Völkermord*, Berlin-Brandenburg: Be.Bbra Verlag, 2008, hlm. 10.

politik diktator atau tirani, tetapi juga manusia yang benar-benar tak bersalah, yang sama sekali tak mengetahui mengapa mereka ditangkap, dianiaya dan dibunuh. Kekejian yang ditimpakan kepada mereka tidak terpaut dengan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka adalah penjahat tanpa kejahatan. Dalam sistem totaliter pengertian “bersalah” atau “tidak bersalah” tidak relevan.³

Menurut Arendt dominasi total atas manusia hanya mungkin dapat terealisasi dengan sempurna dalam kamp-kamp konsentrasi, karena kamp-kamp konsentrasi tidak hanya dimaksudkan untuk membinasakan dan merendahkan martabat manusia, tetapi juga dijadikan sebagai laboratorium bagi eksperimen “segalanya adalah mungkin” guna memusnahkan spontanitas dan kebebasan manusia, “di mana boneka-boneka hidup diciptakan tanpa spontanitas sedikit pun”.⁴ Dengan demikian tercipta sebuah kondisi di mana tindakan politik untuk menentang rezim menjadi mustahil. Berkat sarana teror total rezim berusaha tidak saja menghancurkan kebebasan sebagai suatu realitas politik yang hidup, tetapi juga menghancurkan kemampuan manusia untuk memulai sesuatu yang baru.

Tulisan ini merupakan telaah kritis atas teori totalitarisme Hannah Arendt dengan mengacu pada karya Hannah Arendt *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*, dan beberapa karya pendukung lainnya. Bagian pertama tulisan ini merupakan ulasan tentang unsur-unsur dasar konsep Arendt tentang dominasi total sebagai bentuk kekuasaan yang sama sekali baru, tak terbandingkan dengan bentuk kekuasaan tradisional. Bagian kedua merupakan paparan tentang langkah-langkah penting menuju dominasi total. Pada bagian ketiga akan diperlihatkan secara gamblang pengumpulan filosofis Arendt dengan pertanyaan bagaimana langkah-langkah yang mesti diambil agar suatu bangsa tidak terpenjara dalam kekelaman masa lalu.

Dominasi Total sebagai Kemungkinan Sejarah

Arendt merupakan salah satu dari sekian filsuf politik yang melakukan studi kritis atas dua jenis ideologi totalitarisme abad ke-

3 Lihat Arendt, *Totalitarisme. op.cit.* hlm. 193-194.

4 *Ibid.*, hlm. 143, 218; 250

20 (=Nationalsozialismus dan Stalinismus) sebagai bentuk kekuasaan yang bertujuan mencapai dominasi total atas manusia dengan cara memusnahkan spontanitas dan kebebasan. Analisa Arendt tentang unsur-unsur penting totalitarisme (seperti antisemitisme dan imperialisme) amat sedikit mengacu pada Stalinisme. Baru pada bagian ketiga *Asal-Usul Totalitarisme* Arendt membahas sistem kekuasaan totaliter secara umum, sambil membuat perbandingan antara kedua jenis totalitarisme. Pada bagian ketiga ini Arendt memulainya dengan subjudul *masyarakat tanpa kelas*, suatu petunjuk jelas yang menggambarkan usaha rezim totaliter untuk mengubah *masyarakat kelas* menjadi *masyarakat-massa*.⁵

Istilah “massa” mengacu pada kelompok orang yang karena jumlahnya banyak, atau karena acuh tak acuh, tidak dapat diintegrasikan dalam satu organisasi berdasarkan kepentingan bersama, dalam partai politik atau organisasi profesi atau serikat buruh. Berbeda dengan konsep “rakyat” yang dalam semua revolusi besar berjuang untuk memperoleh perwakilan yang sejati karena memiliki kesadaran akan kepentingan bersama, maka “massa” tidak memiliki artikulasi jelas yang terungkap dalam tujuan-tujuan yang tegas, terbatas dan dapat dicapai; kelompok massa menggantung nasibnya pada dan membutuhkan pemimpin besar, *Führer*, suatu sebutan yang lazim buat Hitler.⁶

Di pihak lain, demikian Arendt, sang *Führer* tidak dapat mempertahankan kekuasaannya jika tidak mendapatkan kepercayaan massa. Tanpa massa sang *Führer* bukanlah siapa-siapa. Namun demikian hal yang paling menentukan adalah bahwa massa tak pernah berhenti mengikuti hukum gerakan yang sudah ditetapkan rezim. Hanya dengan cara ini dinamika gerakan totaliter terjamin, bahwa setiap individu terkungkung total dalam gerakan. Tanpa massa gerakan totaliter tak akan pernah ada.⁷

5 Michal Aharony, *Über das Lager – Die Vernichtung des Menschen als Menschen in der Totalen Herrschaft*, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung, Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien Verlag, 2013, hlm. 95-118, 98.

6 Hannah Arendt, *Totalitarisme*, hlm. 11. Bdk. F. Budi Hardiman, *Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*. Maumere: Ledalero, 2010, hlm. 74-78.

7 Bdk. Kurt Sontheimer, *Hannah Arendt. Der Weg einer großen Denkerin*, München: Piper Verlag, 2005, hlm. 80-81.

Sarana penting dalam eksperimen dominasi total adalah propaganda dan teror serta ideologi. Propaganda dipakai terutama untuk membuat massa patuh total pada ideologi, juga terutama memuaskan kebutuhan massa melarikan diri dari persoalan hidup yang nyata.⁸ Namun kekuatan propaganda amat terbatas untuk mengontrol gerakan secara mutlak, maka sarana teror total dibutuhkan dan menurut Arendt teror total merupakan esensi pemerintahan totaliter.⁹ Teror menjadi total bila teror tidak saja diarahkan untuk mengontrol oposisi, melainkan juga terutama orang yang sama sekali tak bersalah, dan tidak mengetahui mengapa mereka ditangkap, disiksa, dibunuh, kelompok manusia yang disebut Arendt sebagai "musuh objektif" atau "penjahat tanpa kejahatan"¹⁰

Bahkan bidikan teror total tidak saja diarahkan pada musuh objektif di Jerman; Kaum Nazi tidak akan pernah puas dengan pemusnahan Yahudi di Jerman, kaum Nazi bahkan sudah merancang langkah-langkah persiapan pemusnahan bangsa Polandia. Bagi rezim Nazi Hitler, perebutan kekuasaan dengan jalan kekerasan tak mempunyai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu dominasi total atas manusia. Rezim Nazi tak pernah akan puas dengan pencapaian perebutan kekuasaan yang bersifat teritorial, sebaliknya mereka berkeyakinan bahwa hanya satu gerakan yang secara permanen digerakkan, yaitu dominasi permanen atas individu di segala bidang kehidupan. Teror total bertujuan selain mendapatkan dukungan mayoritas massa, juga membersihkan semua kekuatan yang bakal merintangi lajunya gerakan.¹¹

Selain teror total, ideologi berperan sentral. Hannah Arendt memperlihatkan dua aspek ideologi yang membahayakan kehidupan politik. *Pertama*, para mengklaim mampu memberikan penjelasan menyeluruh semua kejadian masa lalu, masa kini dan masa depan.¹²

8 Lihat Hannah Arendt, *Totalitarisme*, p. hlm.. Lihat juga Peter Baehr, *Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences*, Stanford: Stanford University Press, 2010, hlm.72. Bdk. Budi Hardiman, hlm. 51-63.

9 Hannah Arendt, *Totalitarisme*, hlm. 191.

10 *Ibid.*, hlm 60; 64..

11 *Ibid.*, hlm. 194.

12 *Ibid.*, hlm. 275.

Segala sesuatu dapat ditempatkan dalam kerangka ideologi dan dijelaskan olehnya, karena dalam ideologi cuma ada kebenaran yang tak bisa dipersoalkan. Dari keyakinan akan adanya kebenaran absolut dalam ideologi muncul tuntutan untuk merealisasikannya dalam bidang politik. Ideologi totaliter bertitik tolak dari sebuah pengandaian bahwa pendapat politik dianggap sebagai kebenaran, sesuatu yang amat berseberangan dengan tradisi politik sejak Aristoteles, yaitu politik sebagai bidang praksis bukanlah perihal "benar-salah", melainkan "lebih-kurang baik". Artinya dalam masalah tindakan tidak ada kemutlakan. Karena selalu ada pro-kontra, maka perlu ada pertimbangan, ada kemungkinan jalan tengah. Dengan mengklaim politik sebagai perihal "benar-salah", selain melegitimasi monopoli atas kekuasaan, rezim totaliter mencabut hak mereka yang berlainan melenceng dari kebenaran. Antara kebenaran dan ketidakbenaran tidak ada tempat bagi toleransi. Di sini tampak bahwa semua pemikiran ideologis berlawanan dengan cita-cita demokrasi. Dalam demokrasi semua warga berhak menyatakan pendapat asal saja ditaat aturan main yang demokratis. Mendasarkan kehidupan bersama atas sebuah ideologi berarti memotong demokrasi dari akarnya.

Kedua, ideologi hendak membebaskan pemikiran dari realitas pengalaman. Ideologi kebal terhadap sentuhan realitas. Karena seorang ideolog tahu semuanya, maka apapun yang dirasakan orang tidak relevan lagi. Tak ada pengalaman apapun yang dapat membantahnya. Propaganda totaliter juga digunakan untuk membebaskan pikiran dari pengalaman dan realitas. Realitas diubah sesuai dengan klaim-klaim kebenaran ideologi.¹³ Selain itu ideologi juga dijadikan oleh rezim totaliter sebagai sarana untuk "memandu tingkah laku bawahannya untuk berperan baik sebagai pelaksana maupun sebagai korban".¹⁴

Mengacu pada pentahapan yang dilakukan oleh Montesquieu atas aneka bentuk sistem pemerintahan, yaitu *Republik*, *Tirani* dan *Totalitarisme*, Arendt menegaskan bahwa "jika keabsahan hukum merupakan hakekat pemerintahan non-tirani dan bebas-hukum adalah hakekat Tirani, maka

13 Steve Buckler, *Hannah Arendt and Political Theory: Challenging the Tradition*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, hlm. 67.

14 Hannah Arendt, *Totalitarisme*. hlm., 271.

teror adalah hakekat dominasi totaliter".¹⁵ Dalam kedua jenis ideologi totalitarisme - semua hukum menjadi *hukum pergerakan*. Stalinisme bertopang pada "hukum sejarah", yaitu pada keyakinan akan perjuangan kelas, Nationalsozialisme mengikuti "hukum alam", yaitu keyakinan akan perjuangan ras'. Untuk menerjemahkan kedua jenis hukum ke dalam realitas politik rezim membutuhkan teror total dengan tujuan agar kekuatan alam atau sejarah melaju bebas tanpa dihambat oleh tindakan spontanitas yang menjadi ciri khas manusia yang bebas.¹⁶ Dengan sarana teror total rezim berupaya memusnahkan ruang antar-manusia (*Zwischen-Raum*) yang oleh Arendt dilihat sebagai ruang politik, ruang di mana manusia dengan bebas mengambil inisiatif bertindak dalam kebebasan.¹⁷

Penelusuran Arendt tentang asal-usul sistem totaliter tidak pertama-pertama berupa kajian historis, melainkan analisa kritis atas beberapa unsur dasar totalitarisme, yaitu antisemitisme, imperialisme atau keruntuhan tatanan negara bangsa. Hannah Arendt hendak memperlihatkan keterkaitan beberapa unsur dasar tersebut yang pada akhirnya mematangkan kondisi bagi lahirnya totalitarisme. Unsur-unsur penting ideologi totaliter seperti antisemitisme dan imperialisme pada dirinya sendiri tidak bercorak totaliter. Namun dalam perjalanan waktu setelah perang dunia pertama, rezim totaliter memanipulasi unsur-unsur ini hingga ke basis faktual yang kemudian menjadi sumber kekuatan dan bobot propaganda rezim.

Demikian misalnya berkat teknik propaganda, unsur antisemitisme dimanipulasi oleh rezim totaliter untuk tujuan dominasi total atas manusia. Betul bahwa antisemitisme modern merupakan suatu proses penajaman konflik nyata dan persaingan antara warga Yahudi dan umat Kristen pada abad ke-18 dan ke-19, namun pada era *Nationalsozialisme* propaganda anti-Yahudi sama sekali tidak terpaut dengan kondisi sosial-ekonomis-religius. Antisemitisme modern menurut Arendt tidak dapat

15 *Ibid.* hlm. 265.

16 Michal Aharony, *Über das Lager*, hlm. 100.

17 "Teror mengganti batas-batas dan jalur komunikasi antar individu dengan pambalut besi yang mempersatukan mereka begitu erat sehingga seolah-olah kemajemukan mereka telah hilang dalam satu manusia dengan dimensi raksasa". Lihat Hannah Arendt, *Totalitarisme...* hlm. 267.

disamakan dengan rasa benci-Yahudi dan juga tidak terkait dengan pertentangan ajaran agama. Sebaliknya antisemitisme adalah rasisme yang memang sengaja dimanipulasi untuk memusnahkan Yahudi.¹⁸

Unsur imperialisme pada awalnya sekadar dimaksudkan memperluas sumber-sumber ekonomi; dalam era *Nationalsozialisme* unsur tersebut digarap menjadi lebih dari sekadar penaklukan dengan tujuan yang bersifat ekonomis. Kekuasaan hasil penaklukan negara tertentu hanyalah sarana untuk tujuan dominasi total. Dalam konteks itu perkembangan antisemitisme modern menurut Arendt amat terpaut dengan keruntuhan *negara-bangsa*: Pada puncak perkembangannya pada abad ke-19, negara kebangsaan memberikan hak-hak yang sama kepada penduduk keturunan Yahudi. Dalam sistem totaliter dia berubah menjadi sekadar sebagai sarana demi kejayaan bangsa Jerman: 'hukum adalah, hukum demi bangsa Jerman'.¹⁹ Namun dengan memasukkan unsur supra-nasional, sistem totaliter mengutuk kepicikan nasionalisme dalam negara kebangsaan dan menolak identifikasi antara antisemitisme dan nasionalisme. Karena gerakan antisemitis tidak sekadar bertujuan memusnahkan warga Yahudi dalam satu negara, melainkan dominasi total atas manusia.

Kamp Konsentrasi sebagai Laboratorium bagi Eksperimen Dominasi Total

Menurut Arendt dominasi total atas manusia hanya dapat terwujud dalam kamp-kamp konsentrasi sebagai lembaga pemusnahan kebebasan secara radikal. Menurut Hannah Arendt, kamp konsentrasi sebagai laboratorium bagi eksperimen dominasi total merupakan konsep kunci untuk memahami ideologi totaliter secara keseluruhan. Dalam kamp-kamp konsentrasi dilakukan eksperimen pemusnahan kemajemukan dan keunikan tiap manusia, "seolah-olah seluruh manusia persis satu individu tunggal saja".²⁰ Eksperimen tersebut tidak saja bertujuan menindas martabat manusia, tetapi juga untuk memusnahkan spontanitas sebagai

18 Hannah Arendt, *Asal-Usul Totalitarisme, Jilid I: Antisemitisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. xi.

19 Dana Ionescu & Samuel Salzborn, *Antisemitismus, Nation und Ordnung Theoretische, historische und empirische Aspekte bei Hannah Arendt*, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung, Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013, hlm. 17-42, 23.

20 Hannah Arendt, *Totalitarisme...*, *op.cit.*, hlm. 217.

ciri khas manusia yang bebas serta mengubah kepribadian menjadi benda semata-mata. Arendt menunjukkan bahwa rezim totaliter tidak dapat bertahan tanpa teror, dan teror tidak akan efektif tanpa kam-kamp konsentrasi.

Pada mulanya publik Jerman membayangkan keberadaan kamp-kamp konsentrasi sejak tahun 1933 sebagai tempat penampungan para tawanan politik yang dianggap sebagai pengkianat gerakan. Karena rahasia kekejian eksperimen yang berlangsung dalam kamp konsentrasi amat bergantung dari tertutupnya rapat-rapat kamp-kamp tersebut terhadap dunia luar, maka dengan slogan *Arbeit macht frei* (kerja membebaskan) publik Jerman ketika itu dikelabui dan tidak memperoleh informasi tentang pelbagai kekejian yang dalam dunia normal hanya terbayang sebagai peristiwa di planet fantasi.²¹ Fakta kekejian dalam kamp baru menjadi “rahasia umum” ketika segelintir mantan penghuni kamp konsentrasi yang entah dengan alasan apa dan dengan cara apa luput dari maut dan sesudah perang dunia pertama mempublikasikan kejadian penting tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Nama-nama seperti David Rousset, Eugen Kogon, Bruno Bettelheims – ketiga-tiganya pernah menjadi penghuni kamp konsentrasi Buchenwald dan Dachau (Jerman), telah memberikan andil bagi keberhasilan riset Hannah Arendt.²²

Dari penelusuran terhadap informasi tentang kekejian yang terjadi dalam kamp konsentrasi, Arendt menyimpulkan bahwa kamp konsentrasi merupakan lembaga sentral sistem totaliter, yang menjadikan bentuk kekuasaan ini terbedakan dari pelbagai bentuk kekuasaan jenis mana pun yang pernah ada dalam sejarah.²³ Kekejian yang terjadi dalam kamp-kamp konsentrasi itu dilukiskan oleh Hannah Arendt sebagai “inkarnasi neraka di bumi”. Arendt menulis:

Kengerian yang sesungguhnya dari kamp konsentrasi dan kamp pembinasan terletak di sini: bahwa penghuninya, bahkan bila mereka kebetulan dipertahankan hidup, terputus efektif dari dunia kehidupan daripada bila mereka meninggal, karena teror menggelar trik-trik

21 *Ibid.*, hlm. 219.

22 *Ibid.*

23 Peter Baehr, hlm. 11-12.

pelupaan. Di sini pembunuh beraksi seperti pelumat seekor nyamuk. Seseorang dapat meninggal akibat penganiayaan sistematis atau kelaparan, atau karena kamp telah terlalu berjejal dan manusia yang berlebihan harus dimusnahkan.²⁴

Kondisi dalam kamp-kamp konsentrasi diciptakan sedemikian rupa di mana hidup dan mati sama-sama dihalangi secara efektif, suatu kondisi yang berada di luar kategori hidup dan mati. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka yang kebetulan kembali kepada kehidupan normal pada ragu untuk menceritakan apa yang mereka alami, karena mereka hampir tak percaya bahwa apa dialami merupakan kejadian nyata. Sebaliknya para pembunuh yang telah ditentukan melakukan kejahatan dan menganggap bijaksana melakukannya karena telah melaksanakan perintah, lebih mudah dipercayai daripada para korban yang mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi.²⁵

Sekali pun kamp konsentrasi tidak merupakan temuan original sistem totaliter²⁶ namun fungsi kamp konsentrasi dalam totalitarisme tidak dapat disejajarkan dengan peran kamp konsentrasi dalam pelbagai bentuk kekuasaan terdahulu. Arendt menandakan pendirian kamp konsentrasi tipe *purgatory* (tempat penyucian) di Uni Soviet yang dipakai sebagai penampungan pekerja paksa atau budak (kamp konsentrasi)²⁷, didasarkan atas asas manfaat. Dalam kamp konsentrasi tipe ini seorang budak atau pekerja paksa— yang walau diisolasi dari keluarga dan kerabatnya—toh budak sebagai mesin kerja masih memiliki harga. Sedangkan kamp konsentrasi Nazi-Hitler ditandai oleh karakternya yang *anti-utilitaristis (anti-manfaat)*: pendirian kamp tidak dilandasi pada asas kegunaan ekonomi atau demi mencari kemungkinan hasil kerja. Hal ini menjadi jelas ketika dalam masa perang saat Jerman amat membutuhkan sarana transportasi raksasa untuk mengangkut pasukan ke garis depan pertempuran, saat membutuhkan tenaga kerja dalam pabrik-pabrik pendukung usaha perang, pembangunan

24 Hannah Arendt, *Totalitarisme....*, hlm. 230; 227-228.

25 *Ibid.*, hlm. 220.

26 Arendt menulis dalam bukunya bahwa kamp konsentrasi muncul pertama kali dalam perang Boer awal abad 20 dan masih tetap dipraktikkan di Afrika Selatan dan India, Kuba. *Ibid.* hlm. 221.

27 *Ibid.*, hlm. 228.

kamp konsentrasi yang mahal sungguh tidak masuk akal. Tampak bagi Hitler, membangun dan mempertahankan keberadaan kamp konsentrasi jauh lebih penting dari pada usaha memenangkan perang.²⁸

Arendt menggolongkan kamp konsentrasi Nazi Hitler dalam tipe *neraka*: di sini seluruh hidup tahanan diorganisir sepenuhnya dan sistematis dengan maksud untuk menghadapi penganiayaan paling kejam dan semua penghuni kamp dibuat menjadi tidak berharga sedikit pun. Berbeda dengan kamp penampungan pekerja paksa, di mana minimal ada ilusi tentang adanya hidup normal, tidak diisolasi secara mutlak dari anggota keluarga, penghuni kamp konsentrasi dalam dominasi total sungguh terisolasi total. Arendt melukiskan kamp konsentrasi sebagai “rongga pelupaan” (*Höhlen des Vergessens*) di mana orang yang masuk ke sana tidak meninggalkan bekas-bekas kehidupannya seperti jasad atau makam seolah-olah mereka tak perada ada di bumi. Dengan membuat kematian menjadi anonim, yaitu suatu teknik membuat orang lupa apakah seorang tawanan masih hidup atau mati, kamp-kamp konsentrasi merampas “makna kematian dari perannya sebagai akhir dari kehidupan seseorang”.²⁹

Kegilaan ini menjadikan proyek kamp konsentrasi sebagai yang amat unik: kamp konsentrasi dengan pelbagai eksperimen yang keji hanya bisa dipahami dalam konteks ideologi totaliter itu sendiri. Hannah Arendt seperti dikutip Michal Aharony membedakan fungsi kamp konsentrasi sebelum dan selama era totalitarisme. Sebelum era totalitarisme kamp konsentrasi hanya bisa dipahami dalam kerangka usaha rezim mengamankan kekuasaan dan memusnahkan lawan-lawan politik. Baru setelah 1938 ketika ribuan warga Yahudi ditangkap, ditahan dan dianiaya, peran kamp konsentrasi berubah secara mendasar. Mereka ditangkap, bukan karena telah melakukan kejahatan atau mengambil sikap oposisi terhadap rezim (“penjahat tanpa kejahatan”). Di sini konsep bersalah atau tidak bersalah tak punya arti sedikit pun.³⁰

28 *Ibid.*, hlm. 229. Bdk. Michal Aharony, hlm. 101.

29 Hannah Arendt, *Totalitarisme*, hlm. 212; 241.

30 *Ibid.*

Lagi pula metode penyiksaan yang diterapkan dalam kamp ditujukan untuk menciptakan kemungkinan memberikan keabadian kepada proses kematian itu sendiri dan menciptakan suatu situasi dalam mana baik hidup maupun mati sama-sama dihalangi secara efektif. Metode penyiksaan yang digunakan bertujuan untuk memanipulasi tubuh manusia dengan kemungkinan menderita tak berhingga. Ini merupakan aspek baru perubahan fungsi kamp konsentrasi.³¹ Petunjuk baru dalam perubahan fungsi kamp diperlihatkan oleh Arendt dengan mengacu pada fakta bahwa baik di Jerman maupun di Rusia jumlah kamp-konsentrasi justru semakin tinggi setelah oposisi dimusnahkan. Dalam kondisi di mana tak ada lagi oposisi, negara dengan mudah diintegrasikan seluruhnya ke dalam gerakan guna mencapai tahap puncak dominasi total.³² Kondisi ini melapangkan jalan bagi eksperimen dominasi total atas manusia hingga titik di mana dimensi hukum, dimensi moral dari manusia serta keunikan atau jati diri manusia dimusnahkan, dengan harapan menghasilkan manusia tunggal (*der Mensch*) atau “boneka-boneka hidup” yang tidak berdaya menghalangi gerakan, dan bukan manusia-manusia dalam pluralitas mereka (*die Menschen*).

Langkah-langkah Menciptakan Manusia Tunggal

Ada pun langkah-langkah penting menuju dominasi total atas individu adalah pembunuhan sisi yuridis manusia, pembunuhan sisi kehidupan moral manusia dan pembunuhan jati diri manusia atau pemusnahan perbedaan individu. Langkah *pertama* adalah penyingkiran sisi yuridis manusia³³; Penghancuran hak-hak dasar manusia, penyingkiran pribadi hukum merupakan prasyarat dasar untuk mencapai dominasi total atas individu. Langkah ini dilakukan dengan membuat undang-undang yang rasis dengan tujuan menjadikan warga Yahudi sebagai warga tuna hukum di negerinya sendiri.

Selain itu kamp konsentrasi ditempatkan di luar sistem hukum pidana normal, di mana penghuninya sebagian besar “orang-orang yang

31 *Ibid.*, hlm. 227; 243.

32 Michal Aharony, hlm. 102.

33 Hannah Arendt, *Totalitarisme*, hlm. 233

sama sekali tidak melakukan apapun baik dalam kesadaran mereka sendiri maupun dalam kesadaran para algojo mereka sehubungan dengan penangkapan mereka".³⁴ Di Jerman kelompok mayoritas yang tak berdosa ini diwakili oleh massa Yahudi yang dinilai sebagai paling cocok untuk eksperimen pencabutan hak memilih dan penghancuran pribadi hukum, dan secara kuantitatif dan kualitatif mereka perupakan penghuni paling mutlak dibutuhkan dalam kamp konsentrasi. Prinsip ini dilaksanakan dalam kamar-kamar gas yang memang tidak dimaksudkan sebagai penyiksaan terhadap individu-individu melainkan bahwa kamar-kamar gas itu diperuntukkan bagi kaum Yahudi', dan tindakan ini pada akhirnya bertujuan untuk membuktikan bahwa manusia memang tak berguna karena itu layak dimusnahkan.

Kedua, langkah yang menurut Arendt merupakan terberat, yaitu pembunuhan sisi moral manusia. Langkah ini membuat sikap *kemartiran* menjadi mustahil, yaitu suatu sikap mengikuti hati nurani sebagai instansi moral yang dapat menolak perintah yang tidak sesuai dengannya. Dengan sarana teror total, rezim totaliter berusaha membuat keputusan hati nurani amat diragukan dan samar-samar. Sebagai contoh Arendt menempatkan seorang ibu dari Yunani yang mengalami dilema moral dan diminta Nazi untuk memilih siapa dari ketiga anaknya yang harus dibunuh, maka pilihannya bukan antara kebaikan dan kejahatan, melainkan antara pembunuhan dan pembunuhan.³⁵ Dengan langkah penyingkiran hati nurani dan akal sehat, rezim totaliter hendak melibatkan semua orang dalam kejahatan rezim totaliter sedemikian rupa sehingga "garis pemisah antara penuntut dan yang dituntut, antara pembunuh dan korbannya semakin menjadi kabur".³⁶

Ketiga, penyingkiran jati diri, pemusnahan kemajemukan individu. Dengan metode penganiayaan yang terukur penghancuran tubuh tidak dilakukan dengan mengakibatkan kematian secara langsung melainkan memanipulasi tubuh dengan kemungkinan menderita tak terhingga.³⁷

34 *Ibid.*, hlm. 236.

35 *Ibid.*, hlm. 242

36 *Ibid.*, hlm. 243

37 *Ibid.*, hlm. 243

Keberhasilan ketiga langkah menuju dominasi total atas individu ini ditunjukkan Arendt dengan mengacu pada kenyataan selain ketiadaan perlawanan dari jutaan manusia yang membiarkan dirinya dibariskan menuju kamar-kamar gas juga minimnya aksi bunuh diri dalam kam konsentrasi. Ketiga langkah ini bertujuan menghilangkan kemampuan individu-individu untuk memulai sesuatu yang baru dengan kekuatan diri sendiri. Eksperimen dalam kamp konsentrasi membuat individu bagai boneka-boneka hidup “berwajah manusia, yang semuanya berperilaku seperti anjing dalam eksperimen Pavlov yang semuanya bereaksi dengan “amat memuaskan” sekalipun harus menghadapi mautnya sendiri dan yang tidak melakukan apa-apa kecuali bereaksi.³⁸

Spontanitas dan individualitas merupakan ancaman serius bagi rezim totaliter karena keduanya akan selalu memunculkan perbedaan dan ruang antar-manusia. Spontanitas merupakan kebebasan manusia dan kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru dan pluralitas akan menguatkan kemungkinan pengambilan tindakan bersama dalam komunikasi. Rezim yang menghendaki dominasi total, harus menyingkirkan spontanitas dan individualitas. Dalam hal ini Arendt mengacu pada Immanuel Kant yang menamakan spontanitas sebagai “ciri dasar rasionalitas dan kebebasan”.³⁹ Namun demikian, Kant tak percaya akan kemungkinan pemusnahan pluralitas. Sebaliknya Arendt memperlihatkan kenyataan dalam kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan massal bahwa spontanitas dapat dimusnahkan dengan sarana totalitarian dengan tujuan membuat manusia tidak berguna. Sebagaimana Arendt jelaskan, tujuan utama rezim totaliter tidak terletak dalam “transformasi dari dunia luar atau perubahan revolusioner masyarakat, tetapi transformasi kodrat manusia itu sendiri”.⁴⁰

Perlu dicatat di sini bahwa perbedaan antara kamp konsentrasi sebagai laboratorium bagi eksperimen dominasi total dan kamp pemusnahan massal tidak cukup tegas dijelaskan oleh Hannah Arendt dalam pelbagai

38 *Ibid.*, hlm. 246

39 Michal Aharony, hlm. 109.

40 Hannah Arendt, *Totalitarisme.*, hlm. 253.

tulisannya. Kedua lembaga ini sama-sama dilihat sebagai “sebagai laboratorium, di dalamnya keyakinan mendasar totalitarisme ialah bahwa semuanya itu mungkin untuk dicari pembenarannya”.⁴¹ Mengacu pada analisa Michal Aharony⁴², dapat dikatakan bahwa transformasi kodrat manusia tidak direalisasikan dalam kamp pemusnahan. Kebanyakan korban yang dibunuh di kamp penampungan tidak menjalani proses sebagaimana yang dialami oleh penghuni kamp konsentrasi; sebagian besar dari para korban yang ditampung dalam kamp penampungan langsung dieksekusi mati. Jadi mereka tidak menempuh stadium “mayat hidup”, seperti yang dilukiskan Arendt. Betul bahwa status yuridis mereka disingkirkan jauh sebelum mereka dibunuh, namun mereka bukan objek, ‘dominasi total’ dalam arti bahwa setelah penyingkiran pribadi moral dan pembersihan individualitas mereka direduksi menjadi sejumlah reaksi, sesuatu yang menurut Arendt sebagai tujuan utama dominasi total. Jika memang dominasi total atas manusia merupakan hakekat totalitarisme, apakah relevan untuk mengatakan juga bahwa kamp pemusnahan massal menjadi lembaga sentral organisasi kekuasaan totaliter?⁴³

Pemulihan Politik

Pemikiran Hannah Arendt tentang tiga langkah menuju dominasi total atas manusia hendak menegaskan bahwa totalitarisme—meminjam ungkapan Marc-Pierre Möll—tidak saja mencerminkan *politik pemusnahan*, melainkan juga merupakan *pemusnahan politik*.⁴⁴ Menurut interpretasi Marc-Pierre Möll ungkapan *politik pemusnahan* mengacu pada fakta pembantaian (fisik) terhadap lebih dari enam juta warga Yahudi. Sedangkan ungkapan *pemusnahan politik* mengacu pada fakta penyingkiran Spontanitas dan

41 *Ibid.*, hlm. 217.

42 Tampaknya kekurangan Arendt ini dapat dikembalikan pada faktor minimnya sumber-sumber yang menggeluti tema dominasi dalam kamp konsentrasi: berita kesaksian para tawanan yang luput dari Holocaust yang kemudian diterbitkan setelah perang dunia kedua. Sebagaimana telah disinggung, kesaksian Bruno Bettelheim, Eugen Kogon dan David Rousset amat penting bagi Arendt dalam usahanya menggali data kekejian dalam kamp konsentrasi. Semua saksi mata yang mendasari teori Hannah Arendt tentang dominasi total pernah menghuni kamp konsentrasi. Dua di antaranya Kogon dan Rousset non-Yahudi. Rousset misalnya banyak mengisahkan kekejian dalam kamp konsentrasi. Lihat Michal Aharony, hlm. 112

43 *Ibid.* hlm.114.

44 Lihat Marc-Pierre Möll, *Gesellschaft und totalitäre Ordnung: Eine theoriegeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus*, Baden-Baden: Nomos Verlag, 1998, hlm. 100.

Individualitas (jati diri) manusia, sebagaimana dijelaskan di atas: demi tujuan dominasi total, rezim merasa perlu menyingkirkan dua unsur ini karena kedua unsur ini akan selalu memunculkan *perbedaan* dan ruang *antar-manusia*. Dengan menyingkirkan *perbedaan* dan *ruang antar-manusia*, proses pemusnahan politik dimulai. Berkat sarana teror total rezim totaliter berhasil menyingkirkan *perbedaan* antar-individu sedemikian rupa sehingga *perbedaan* antar-individu seolah-olah “menghilang dalam satu manusia dengan dimensi raksasa”.⁴⁵

Selanjutnya dengan memusnahkan ruang *antar-individu* rezim totaliter memusnahkan serta menghancurkan kebebasan sebagai suatu realitas politik yang hidup, yaitu kemampuan untuk bergerak bersama-sama, yang tidak mungkin ada tanpa ruang. Sebagaimana akan segera diuraikan di bawah ini, (tindakan) politik membutuhkan suatu ruang, ruang itu adalah ruang *antar-manusia*. Politik bukan hidup *dalam manusia* sebagai Aristoteles memahaminya, melainkan dalam ruang *antar-manusia*. Dalam ruang *antar-manusia* inilah politik menjadi mungkin dan hidup ketika manusia-manusia “tak hanya bertindak atau berbuat sesuatu, melainkan bertindak dalam kebersamaan dan kesalingan”.⁴⁶ Dengan kata lain realitas politik yang hidup hanya mungkin terwujud dalam ruang *antar-manusia*. Pemusnahan ruang ini identik dengan pemusnahan politik dan akibatnya politik menjadi monopoli seseorang atau sekelompok orang, awal dari malapetaka yang telah dipamerkan dalam totalitarisme.

Sekalipun sistem totaliter telah berhasil melakukan *politik pemusnahan* dan *pemusnahan politik* namun Hannah Arendt berkeyakinan bahwa rezim totaliter “tidak berhasil menghapus cinta akan kebebasan dari lubuk hati manusia”.⁴⁷ Dengan bertitik tolak dari keyakinan ini, Hannah Arendt memulai petualangan intelektualnya untuk “merehabilitasi” politik yang dalam totalitarisme dimaknai sebagai dominasi (*Herrschaft*) atau kekerasan (*Gewalt*). Di satu pihak totalitarisme mengandung dalam dirinya “virus” yang berpotensi mengakhiri dirinya sendiri. Artinya,

45 Hannah Arendt, *Totalitarisme*, hlm. 266.

46 Hannah Arendt, *Denken ohne Geländer: Texte und Briefe*. Herausgegeben von Heidi Bohnet und Klaus Stadler. München: Piper Verlag, 2006, hlm. 92.

47 Hannah Arendt, *Totalitarisme*, hlm. 267.

walaupun ideologisasi menyeluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat dan sistem teror total dapat membungkamkan masyarakat, akan tetapi sistem totaliter tidak mampu melegitimasi kekuasaan dan karena itu pula tak mampu memberikan motivasi bagi seluruh warga masyarakat untuk mempertahankan sistem yang mau dilestarikan. Di pihak lain Arendt menghendaki agar masyarakat dalam suatu negara tidak hanya menunggu pasif sampai "virus" bekerja mengakhiri sistem totaliter.⁴⁸

Yang paling dibutuhkan menurut Arendt, sebagaimana diinterpretasikan oleh Margaret Canovan, adalah *solusi politik*, karena "hanyalah politik, yang dapat memberikan kita kemungkinan menggarap padang tandus masa lalu yang tanpa hukum menjadi dunia yang lebih manusiawi"⁴⁹. Solusi "politik" menjadi penting mengingat bahwa warga Yahudi menjadi korban kekejian sistem totaliter karena mereka tidak mampu dan dibuat tidak mampu untuk ber-politik. Canovan menyimpulkan pemikiran politik Hannah Arendt demikian: "jika Hannah Arendt berbicara tentang politik maka yang dimaksudkannya bukan sekedar berkuasa, melainkan berbicara tentang kebebasan"⁵⁰.

Teori politik Arendt boleh dikatakan sebagai respons etis atas beberapa pertanyaan mendasar seperti: bagaimana kebebasan politik diinstitutionalisasi, agar warga negara tidak membiarkan diri menjadi "massa" bagai boneka-boneka hidup tanpa tindakan atau bahkan berkolaborasi dengan rezim yang tak segan-segan melanggar hak-hak dasar? Bagaimana satu bangsa menggarap kekelaman masa lalunya sedemikian agar dapat melangkah dengan mantap menyongsong masa depan bersama penuh damai dan adil?

Menurut Arendt ada dua kemungkinan pemulihan politik, yaitu *memaafkan* dan *berjanji*; keduanya merupakan modus melalui suatu bangsa dibebaskan dari masa lalunya yang kelam, dan dengan mantap

48 Hannah Arendt memperlihatkan fakta kolaborasi beberapa tokoh atau pemimpin Yahudi yang bekerjasama dengan rezim untuk menghabisi saudara-saudarinya sendiri, dan hal ini merupakan tahap tergelap dalam sejarah bangsa Yahudi. Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen*. München: Piper Verlag, 1986, hlm. 35; 153.

49 Lihat Margaret Canovan, *Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, hlm. 277.

50 *Ibid.*, hlm. 62.

berjalan menuju masa depan sekalipun penuh tanda tanya. Kedua jenis kemampuan tersebut berakar dalam *tindakan*. Dan *tindakan* selalu berarti memulai sesuatu yang baru.⁵¹ Arendt bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia ditandai oleh *natalitas*, suatu prinsip kelahiran kembali dalam tindakan. Hidup manusia yang hancur dapat dipulihkan kembali dengan kemampuan manusia untuk lahir kembali dalam tindakan, artinya manusia selalu terbuka untuk merealisasikan suatu “mukjizat”, mengambil inisiatif, melakukan tindakan, untuk memulai sesuatu baru.⁵² “*Tindakan* adalah hakekat kebebasan”.⁵³ Dalam sebuah *tindakan* termuat kemampuan manusia untuk merealisasikan kebebasannya.⁵⁴

Kedua aksi ini, memaafkan dan saling berjanji - selalu merupakan peristiwa sosial, keduanya mengandaikan pluralitas, yaitu kehadiran orang lain. Memaafkan diri dan berjanji pada diri sendiri secara sosial tidaklah mengikat dan tak berkekuatan. Mengampuni dan berjanji mengandaikan keberadaan pihak lain dalam kebersamaan. Di sini berlaku: hanya orang yang dimaafkan dapat memaafkan dirinya dan sesamanya; hanya orang yang mendapatkan janji terpercaya, dapat berjanji dengan dirinya sendiri dan kepada orang lain dan berpegang teguh pada janji tersebut.⁵⁵ Memaafkan tidak berarti melupakan masa lalu seolah-olah kekejian tak pernah terjadi. Memaafkan amat terpaut dengan pandangan bahwa pelaku-pelaku kejahatan masa lalu tidak dikurung selamanya dalam kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu, melainkan dibiarkan menatap dan melangkah menuju masa depannya. Tindakan memaafkan ini juga juga dimungkinkan oleh kesadaran bahwa tidak semua manusia bertindak benar

Di pihak lain, berjanji merupakan bentuk tindakan yang menyiratkan suatu awal yang baru. Karena manusia pada dasarnya makhluk yang

51 Hannah Arendt *Vita Activa oder Vom tätigen Leben*, 7. Auflage der Neuauflage, München: Piper Verlag, 1992, hlm. 47.

52 *Ibid.*, hlm. 217; Arendt, *Was ist Politik? Aus dem Nachlass* hrsg. von Ursula Ludz, München: Piper Verlag, 1993, hlm.34

53 Hannah Arendt, *Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I*, hrsg. von Ursula Ludz, München: Piper Verlag 1994, hlm. 124.

54 *Ibid.* hlm. 79.

55 Gesine Schwan, “Die Macht der Gemeinsamkeit”, dalam: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 39/2006, hlm.3-7, 4

bebas, maka ia selalu terancam oleh situasi ketidak-terdugaan; dan karena tidak ada tindakan berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu mengacu pada kebersamaan dalam perbedaan, maka konsekwensi tindakan selalu tidak dapat diramalkan sebelumnya, hal ini berlaku untuk pelaku sendiri. Dalam konteks inilah aksi saling berjanji memberi dasar dan arah bagi terbentuknya solidaritas warga suatu bangsa, karena dengan saling berjanji, kekuasaan dalam arti berkumpul dan bertindak bersama dihadirkan kembali. Kehidupan politik yang hancur dapat dipulihkan dengan kemampuan manusia untuk lahir kembali dalam tindakan.⁵⁶

Dalam *Vita activa* Arendt menegaskan bahwa kemanusiaan kita mewujudkan diri terutama dalam *tindakan*, bukan dalam *ada* (*sein*). Arendt membedakan antara *arbeiten* (bekerja), *herstellen* (berkarya) dan *handeln* (bertindak: hasil kreativitas, spontanitas dan kebebasan subjek). Perbedaan ini merupakan landasan teoretis bagi distingsi antara kekuasaan (*Macht*) dan Dominasi (*Herrschaft*).⁵⁷ *Bekerja* menduduki anak tangga terendah dari hierarki *vita activa*, karena dia merupakan sesuatu yang niscaya, suatu aktivitas harian yang berhubungan dengan proses biologis dan dituntun oleh keniscayaan, jadi tidak bebas. Sedangkan *karya* adalah aktivitas yang bersifat produktif, dalam arti bahwa satu proses diikuti untuk mencapai tujuan yang bersifat material. Aktivitas jenis ini dicirikan oleh dominasi atau kontrol penguasaan manusia.

Tindakan adalah aktivitas manusia yang tidak dipahami dalam kategori penguasaan atau kontrol manusia seperti lazim dalam aktivitas *Karya*, melainkan dalam kategori komunikasi. *Tindakan* adalah aktivitas yang dilakukan manusia ketika mereka berkomunikasi satu sama lain. Jika *karya* masih tunduk pada jenis tujuan yang bersifat instrumental, *tindakan* tidak mempunyai tujuan di luar dirinya, dalam tindakan tidak pernah ada kepastian mengenai hasilnya, karena dalam tindakan ada kebebasan dan spontanitas. *Tindakan* menempati tingkat tertinggi aktivitas manusia yang menopang kehidupan bersama secara manusiawi. *Tindakan* terwujud dalam ruang publik, dalam mana manusia dalam keberagamannya

56 F. Budi Hardiman, hlm. 48-49

57 Arendt *Vita Activa*, hlm. 14-23.

berdiskusi, berbicara, saling bertukar pikiran demi kebaikan bersama.⁵⁸

Jika Arendt berbicara tentang *tindakan*, ia tidak berbicara tentang manusia singular yang bertindak, karena *tindakan* selalu dalam kerangka pluralitas.⁵⁹ Faktum pluralitas ini terwujud dalam dua cara: dalam persamaan dan perbedaan. Tanpa persamaan antara manusia sebagai manusia tak ada kemungkinan persetujuan; jika tidak ada perbedaan di antara manusia, maka tidak ada dasar untuk mencari persetujuan di antara mereka. Jika dalam hal *karya*, aktivitas dalam kesendirian adalah mungkin, maka dalam *tindakan* hal itu tidak mungkin. Tindakan selalu merupakan tindakan bersama orang lain.

Perbedaan lain antarakarya dan *tindakan* terletak dalam "arah" aktivitas. Dalam *karya* pelaku sudah mempunyai model atau minimal bayangan akan hasil yang merupakan sasaran atau tujuan kegiatan. Sebaliknya *tindakan* pada dirinya sendiri merupakan tujuan; tujuan tindakan adalah aktualitas atau pelaksanaan tindakan itu sendiri.⁶⁰ *Tindakan* selalu terjadi dalam suatu ruang antar-manusia, ruang *Zwischen-Raum*.⁶¹ Ruang ini merupakan area di mana manusia-manusia dengan pelbagai kepentingan yang berbeda saling berbicara, berkomunikasi demi kehidupan bersama. *Zwischen-Raum* tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, melainkan juga terjadi dalam dunia di mana manusia-manusia saling berbicara dan berkomunikasi satu sama lain.⁶²

Arendt memperlihatkan kelemahan yang telah menyertai tradisi pemikiran politik Barat yang dinilai sebagai tidak memadai untuk mengantisipasi munculnya gerakan totaliter abad abad kedua puluh. Pada hal tradisi pemikiran Barat pernah berguru pada pemikiran Aristoteles yang memaknai politik sebagai bidang *praxis*, yaitu bidang yang menyibukkan diri dengan perihal „lebih-kurang baik“ dan bukan perihal “benar-salah”. Arendt bertanya, mengapa sistem totaliter begitu mudah “melabrak” tradisi pemikiran politik yang begitu berakar dalam peradaban Eropa?

58 *Ibid.*, hlm. 15. Bdk. Kurt Sontheimer, hlm. 110-112.

59 Arendt *Vita Activa*, hlm. 15.

60 *Ibid.*, hlm.201.

61 *Ibid.*, hlm.173.

62 *Ibid.*, hlm.192.

Hannah Arendt mengembalikan hal itu pada kelemahan Aristoteles sendiri ketika Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai *zoon politikon*. Dengan formula *zoon politikon* Aristoteles menempatkan hakekat politik dalam manusia. Arendt sebaliknya menegaskan bahwa hakekat politik tidak termaktub dalam manusia, melainkan di luar manusia, tepatnya di area ruang antar-manusia (*Zwischen-Raum*). Politik tidak terpaut dengan manusia singular, melainkan manusia dalam kategori pluralitas, di mana individu-individu dalam keunikan masing-masing dan kepentingan yang berbeda-beda saling berdialog, bertindak bersama dalam kesalingan, demi kebaikan bersama. *Zwischen-Raum* merupakan area di mana kebebasan dan spontanitas manusia menjadi prasyarat penting bagi kehidupan politik. Makna politik adalah kebebasan. Kebebasan hanya terdapat dalam *Zwischen-Raum* itu.⁶³ Dan yang membuat seorang menjadi mahluk politik adalah kemampuan mengambil tindakan dalam kebersamaan; kemampuan itu memungkinkan dia berkumpul bersama dengan rekan-rekannya, untuk bertindak bersama, dan mengejar tujuan-tujuannya dan usaha-usaha yang belum pernah terlintas dalam pikirannya, apa lagi menjadi hasrat hatinya untuk memulai sesuatu yang baru. Kegiatan politik adalah kegiatan kebebasan dalam kebersamaan. Politik adalah komunikasi bebas dominasi.⁶⁴

Menurut Hannah Arendt konsep "polis" yang dilihatnya sebagai ideal bagi penataan kehidupan bersama amat dekat dengan pengertian kebebasan. Ciri utama kehidupan bersama dalam *polis* adalah kebebasan. Politik dan kebebasan menurutnya merupakan hal satu dan sama: Makna politik dalam *Polis*, adalah bahwa manusia berhubungan satu sama lain dan berbicara bersama dalam kebebasan, bebas dari kekerasan, paksaan dan dominasi (*Herrschaft*).⁶⁵

Arendt menyimpulkan bahwa kekuasaan (*Macht*) berhubungan dengan kemampuan manusia untuk tidak sekadar bertindak melainkan bertindak bersama-sama, dalam kesalingan. Hakekat kekuasaan tidak

63 Hannah Arendt, *Was ist Politik?*, hlm. 11-12 F. Budi Hardiman, hlm. 29; 40.

64 F. Budi Hardiman, *...op. cit.* hlm. 33-39.

65 Hannah Arendt, *Was ist Politik?*...hlm. 39.

pernah termaktup *dalam* manusia singular, kekuasaan tidak pernah menjadi monopoli seseorang atau kelompok tertentu. Jika seseorang mengatakan bahwa ia memiliki kekuasaan, dalam kenyataan itu berarti, kekuasaannya mendapatkan pengakuan bebas semua warga. Arendt menamakannya *potestas in populo* dan menambahkan, tanpa pengakuan bebas peserta, tidak ada kekuasaan. Kekuasaan selalu menyangkut persetujuan dan pengakuan bebas warga dan bukan menyangkut kepatuhan.⁶⁶

Arendt baru berbicara tentang kekuasaan jika suatu tatanan didasarkan pada pengakuan bebas semua warga, sedangkan dominasi (*Herrschaft*) merupakan bentuk kekuasaan yang rapuh. Orang bisa saja menerjemahkan kekuasaan dalam kategori dominasi (*Herrschaft*) atau kekerasan (*Gewalt*), dan dapat saja mencapai kemenangan, namun harga yang harus dibayar untuk sebuah kemenangan amat mahal, karena di sini tidak saja menyangkut pihak yang kalah, si pemenang pun membayarnya dengan kehilangan kekuasaan itu sendiri, karena kekerasan tidak menghasilkan legitimasi. Lagi pula ciri khusus suatu tatanan yang bersandar pada dominasi adalah ketidakstabilannya, karena tatanan itu tidak didasarkan pada pengakuan bebas semua pihak yang terlibat, melainkan pada paksaan atau kekerasan atau penindasan. Tatanan seperti itu hanya bertahan selama penguasa mempertahankan daya pengancamnya. Sebaliknya adanya hubungan kekuasaan yang didasarkan pada pengakuan bebas warga, merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena itu tidak perlu dipaksakan apalagi dengan sarana kekerasan atau teror. Kekerasan selalu didasarkan pada ketakberdayaan penguasa yang mulai menyadari kekuasaannya terancam rapuh, tanpa legitimasi. Di sinilah letak ironi sistem politik totaliter atau tirani: Kekerasan, karena dapat mengakhiri kekuasaan, justru mengancam kekuasaannya sendiri.⁶⁷

Konsep politik Hannah Arendt tidak dapat dipahami dalam kategori “*kekuasaan atas*”, melainkan “*kekuasaan untuk*” yaitu kekuasaan sebagai kemampuan “tak hanya bertindak atau berbuat sesuatu, melainkan

66 Hannah Arendt, *Macht und Gewalt*, 8. Auflage, München: Piper Verlag, 1993, hlm. 44-58.

67 Hannah Arendt, *Denken ohne Geländer...* hlm. 92.

bertindak dalam kebersamaan dan kesalingan".⁶⁸ Dengan mengambil posisi ini Hannah Arendt sesungguhnya hendak menjauhkan diri dari pemaknaan politik sebagai penguasaan yang satu *atas* yang banyak yang telah lama berakar dalam pemikiran politik dan demikian juga mengambil jarak terhadap pemaknaan politik sebagai kedaulatan. Hannah Arendt misalnya mengutip Max Weber yang mendefinisikan kekuasaan sebagai "setiap peluang untuk memaksakan kehendak sendiri dalam sebuah hubungan sosial juga kalau kehendak itu ditentang".⁶⁹

Konsep kedaulatan (*Souväerenitätsdenken*) juga menurut Arendt memuat pemaknaan politik sebagai *penguasaan atas*. Orang yang berdaulat berarti orang yang mengklaim berhak penuh atas dirinya dan bebas dari pengaruh orang lain, dalam hal ini ia merdeka dan otonom. Pada level kehidupan politik paham kedaulatan mengandaikan bahwa ada orang atau sekelompok orang yang merasa diri "unggul" atas yang lain, karena itu merasa berhak memberi perintah.⁷⁰ Menurut Arendt sebagaimana diinterpretasikan oleh Katrin Meyer, paham kedaulatan tak beda jauh dari modus aktivitas *karya*. Dalam *karya* manusia tampil sebagai pengontrol atas apa yang dikerjakannya menurut rencana yang sudah ditetapkannya. Diterjemahkan dalam bidang politik hal itu berarti, politik identik dengan *penguasaan atas*⁷¹, dan politik dipandu oleh sejenis rasionalitas tujuan yang khas bagi *homo economicus*. Yang khas pada rasionalitas tujuan adalah bahwa pedoman normatif tidak diutamakan. Yang penting adalah tercapainya tujuan yang dimaksud berupa manfaat sebesar-besarnya. Pemilihan cara-cara yang digunakan tidak didasarkan pada norma-norma tertentu, tetapi hanya pada pertimbangan biaya.⁷²

Bagi Arendt *tindakan* politik tidak dapat dipahami dalam kerangka *sarana-tujuan*, melainkan tindakan manusia-manusia dalam kebersamaan

68 *Ibid.*

69 Hannah Arendt, *Macht und Gewalt...*, *op.cit.*, hlm. 45.

70 Lihat Katrin Meyer, *Ordnung jenseits von Souveränität. Arendts Verständnis demokratisch geteilter Macht*, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung. Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013, hlm. 235-257.

71 *Ibid.*, hlm.237.

72 *Ibid.*, hlm. 240.

dan kesalingan adalah tujuan pada dirinya sendiri.⁷³ Kekuasaan politik baru terjadi apabila suatu tatanan didasarkan pada pengakuan bebas semua peserta dan pengakuan bebas-aktif warga negara merupakan pembalikan dari skema kedaulatan: Karena konteks tindakan politik selalu berupa pluralitas perspektif atau aneka pandangan yang berbeda bahkan saling bertentangan, maka konsepsi kedaulatan “hanya mungkin dalam kesewenang-wenangan atau keangkuhan”.⁷⁴

Dari perspektif teori tindakan, Arendt memperlihatkan secara praktis ketidakmungkinan paham kedaulatan.⁷⁵ Ketidakmungkinan tersebut amat terpaut dengan struktur tindakan yang menurut Arendt dicirikan oleh keserentakan antara awal dan kelanjutan atau penyempurnaan suatu tindakan.⁷⁶ Setiap tindakan - yang tidak hanya dimulai, melainkan juga harus dilanjutkan bahkan disempurnakan, amat bergantung pada reaksi pihak lain. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemberi perintah selalu ada dalam ketergantungan pada reaksi dari pihak yang menerima perintah, yakni mereka yang dengan kepatuhan ikut memungkinkan perintah sebagai tindakan penuh kuasa. Ketergantungan inilah yang merintangikan kemungkinan bahwa seseorang tampil sebagai pemegang kedaulatan penuh. “Bahkan seorang tyran pun membutuhkan pembantu”, kata Arendt sebagaimana dikutip oleh Katrin Meyer.⁷⁷

Kekuasaan *tindakan bersama* amat berbeda dengan kekuasaan dalam kategori kedaulatan versi Thomas Hobbes misalnya. Hobbes baru bicara tentang kekuasaan jika “seseorang memiliki kekuasaan lebih banyak *atas* yang lain”.⁷⁸ Menurut Arendt pemaknaan seperti ini mengimplikasikan unsur paksaan untuk memperbesar kekuasaan yang satu atas yang banyak. Secara historis hal ini terwujud dalam akumulasi kekuasaan tanpa

73 Bdk. Hannah Arendt, *Macht und Gewalt*, hlm. 52.

74 Hannah Arendt, *Vita Activa*, hlm. 230.

75 Lihat juga Jürgen Förster, *Souveränität als Fiktion – Arendts Kritik an einem antipolitischen Konzept der Politik*, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung, Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013, hlm. 207-231.

76 Hannah Arendt, *Vita Activa*, hlm. 181.

77 Katrin Meyer, hlm. 239.

78 Hannah Arendt, *Asal-Usul Totalitarisme, Jilid II: Imperialisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hlm. 32-41.

batas dalam ideologi Imperialisme dan Kapitalisme yang menganggangi kebebasan. Puncak perkembangan ini terdapat dalam sistem totaliter di mana pluralitas total dilindas dan pemutlakan kekuasaan pada seorang pemimpin besar, *Führer*, menjadi tak terkendali.

Dalam sejarah konsepsi kedaulatan dipakai sebagai sarana integrasi dalam suatu masyarakat majemuk. Arendt meragukannya dengan menegaskan - sebagaimana diinterpretasikan oleh Jürgen Förster, bahwa pemerintah atau penguasa tidak dapat bersandar pada kekuatan perintah, atau ancaman atau kekerasan, melainkan pada pluralitas. Kekuatan perintah bagaimana pun juga tidak dapat melegitimasi kekuasaan dan tidak mampu memberikan motivasi memelihara tatanan yang diinginkan penguasa.⁷⁹ Kekuasaan negara mesti didasarkan pada pengakuan bebas para warga negara, dan bukan pada kepatuhan. Dengan kata lain negara tidak dipahami sebagai substansi di atas individu-individu melainkan sebagai "komunikasi, dan komunikasi adalah aktivitas, gerakan, dinamika antara individu-individu, dia berhenti manakala individu-individu tercerai berai".⁸⁰

Negara bertugas untuk menyiapkan kondisi yang memungkinkan warga tampil dalam *ruang antara*. Hanya dalam *ruang antara* terdapat kebebasan. Dengan latar belakang pemikiran ini bisa dipahami, mengapa Arendt memandang tugas politik untuk menata dunia bersama sangat menentukan. Dunia bersama dan bukan manusia singular merupakan sentrum dari tindakan politik. Jika manusia singular (*der Mensch*) merupakan makna dan tujuan politik, maka bukan tak mungkin politik bermuara pada apa yang dinamakan *diktatur pendidikan* (*Erziehungsdiktatur*) dan *teror kebajikan* (*Tugendterror*), artinya politik mengandung keinginan untuk mengubah manusia lain menurut suatu tujuan yang telah ditetapkan.⁸¹

Paham kedaulatan menurut Arendt diam-diam memuat tendensi akumulasi kekuasaan pada seseorang atau sekelompok orang. Sebagai

79 Jürgen Förster, *Souveränität als Fiktion* – hlm. 217.

80 F. Budi Hardiman, hlm. 35.

81 Arendt, *Was ist Politik*, hlm. 24.

alternatif Arendt menggunakan paham “pembagian kekuasaan”, suatu konsep yang mengacu pada pluralitas.⁸² Paham ini dapat dimaknai dalam dua arah. *Pertama*, “pembagian” mengacu pada upaya peningkatan kemungkinan partisipasi yang lebih luas. *Kedua*, ‘pembagian’ menunjuk pada pengurangan kekuasaan, yaitu kesediaan agar perwujudan kepentingan diri sendiri dikontrol oleh pihak lain dan dibatasi demi terciptanya kebaikan umum.⁸³ Dalam hal ini Arendt berbicara tentang pentingnya penguatan *civil-society* dalam ruang-antara (*Zwischen-Raum*), yaitu lembaga-lembaga intermedier yang dapat melindungi individu dari tendensi penguasaan (dominasi). Lembaga-lembaga seperti pers, LSM, serikat buruh atau lembaga keagamaan amat dapat memainkan peran di sini dengan tujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan warga mampu ber-tindak, atau berpolitik.⁸⁴ Politik dipulihkan kembali ketika warga negara mulai mengambil inisiatif untuk mengorganisasi diri. Terutama pers yang otonom dapat menjadi saluran politik para warga untuk mengikis habis kebohongan ideologi sistem totaliter atau diktator yang selalu berupaya menjauhkan warga dari realitas dan kebenaran.

Arendt memperlihatkan fakta godaan dalam sejarah, yaitu godaan untuk memaknai kekuasaan politik menurut model *karya*. Godaan tersebut menurutnya muncul dari perasaan ketidakpastian di pihak penguasa dan hal tersebut amat terkait dengan ciri khas *tindakan*: dalam tindakan tidak pernah ada kepastian mengenai hasilnya, karena dalam tindakan ada kebebasan dan spontanitas manusia, yang akibat-akibatnya tak dapat diramalkan. Lagi pula dunia manusia bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya (*given*), melainkan sesuatu yang dibuatnya sendiri dan dibuatnya bersama-sama dengan orang lain. Tidak ada yang pasti, semuanya bergerak dan tak pernah diketahui apa yang terjadi di masa depan. Dengan ungkapan lain, kontingensi adalah harga dari kebebasan. Manusia selalu bertindak menuju masa depan yang terbuka dan tak pasti.⁸⁵

82 Arendt, *Vita Activa*, hlm. 195.

83 *Ibid.*

84 F. Budi Hardiman, hlm. 34.

85 Arendt *Vita activa*, hlm. 237.

Dengan keputusannya yang berdaulat, pihak penguasa yang tidak nyaman dengan pelbagai kemungkinan yang lahir dari tindakan (tindakan = memuai sesuatu yang baru), terdorong dan merasa berkepentingan untuk mengamankan kekuasaannya dengan cara mengakhiri setiap diskusi dan pembicaraan dalam *ruang antara*. Yang terjadi bukan komunikasi melainkan perintah dengan hasil: kekuasaan yang *satu atas yang banyak* hanya mungkin dipertahankan dengan ketakberdayaan yang *banyak* terhadap yang satu. Seseorang berkuasa dan bebas sementara yang banyak bergantung dan tidak bebas. Logika penguasa yang berdaulat adalah *Entweder-Oder* (atau-atau), suatu logika warisan Carl Schmitt: sahabat atau musuh, perang atau damai, ketertiban atau anarki. Kebebasan dalam bingkai konsep kedaulatan adalah kebebasan memilih di antara alternatif-alternatif tersebut. Kekuasaan di sini selalu berarti kemampuan untuk memaksakan kehendak, dan dengan demikian mengakhiri pluralitas sebagai hakekat tindakan.

Tindakan selalu mengandaikan pihak lain dan bersama-sama berbicara dalam ruang komunikasi tanpa dominasi. Jika *tindakan* selalu merupakan aktivitas bersama-sama pihak lain, maka keputusan menyangkut kehidupan bersama merupakan petualangan yang baru, dan karenanya tidak bisa diprediksi sebelumnya dan juga tidak didikte oleh suatu tujuan yang diam-diam dirancang oleh salah satu pihak. Arendt mengaitkan hal ini dengan faktum *natalitas* manusia, yaitu bahwa kita dilahirkan dalam tindakan dan tindakan sama dengan memulai yang baru.

Penutup

Dari keseluruhan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa penegasan. *Pertama*, politik pemusnahan dan pemusnahan politik dalam konteks sistem totalitarisme sebagaimana diperlihatkan oleh Hannah Arendt dalam pelbagai tulisannya amat dan selalu aktual untuk diperbincangkan kembali, mengingat bahwa ideologi totaliter tidak selalu muncul tiba-tiba bagai makhluk aneh dari planet lain sebagaimana Arendt berulang-ulang menegaskan, dan tak dapat dibandingkan dengan bentuk kekuasaan tradisional yang pernah ada. Karena totalitarisme sebagaimana diuraikan Arendt mempunyai asal-usulnya dalam unsur-

unsur yang pada dirinya sendiri tidak atau belum bersifat totaliter, seperti Antisemitisme dan Imperialisme. Dengan teknik propaganda dan ideologi totaliter unsur-unsur ini dimanipulasi untuk tujuan yang bersifat totaliter, yaitu dominasi total atas manusia. Padahal Antisemitisme misalnya bukan melulu kebencian kepada bangsa Yahudi dan bukan pula pertentangan ajaran agama. Antisemitisme adalah Rasisme yang dimanipulasi untuk memusnahkan bangsa Yahudi.

Kedua, Hannah Arendt di satu sisi tidak memandang sistem totaliter sebagai bagian integral dari modernitas; dia menyebutnya sebagai “celah hitam” (*schwarzen Loch*) dalam peradaban modern. Betapa tidak, modernitas selalu diasosiasikan dengan *Vernunft* atau *Aufklärung* dan demokrasi sebagai jaminan kebebasan. Sistem totaliter yang mencerminkan politik pemusnahan dan pemusnahan politik mestinya datang dari planet lain yang tidak dapat ditempatkan dalam kerangka semangat peradaban modern. Namun di sisi lain, faktum munculnya sistem totaliter di era *pasca-Aufklärung* (abad abad kedua puluh) menurut Arendt merupakan signal kuat bahwa perkembangan itu terulang lagi kapan pun dan di mana pun dengan mengulangi cara yang sama: memanipulasi unsur-unsur yang tadinya tidak bersifat totaliter untuk tujuan yang sifatnya totaliter. Ideologisasi kehidupan politik bisa terjadi juga dalam sistem non-totaliter: Atas nama ideologi pembangunan misalnya, deretan penderitaan korban dianggap wajar, hak asasi manusia dilanggar dan demokrasi ditunda hingga pertumbuhan ekonomi mencapai tahap yang diinginkan penguasa.

Ketiga, Arendt memperlihatkan suatu optimisme di tengah eksperimen dominasi total dalam sistem totaliter bahwa pembunuhan tetap merupakan kejahatan terbatas. Si pembunuh dapat saja menghancurkan suatu kehidupan, tetapi dia tidak dapat menghancurkan fakta adanya pembunuhan itu sendiri. Dua kemungkinan rehabilitasi kehidupan politik yang telah hancur merupakan jalan keluar yang ditawarkan Arendt amat relevan bagi perjalanan semua bangsa yang pernah ditimpa tragedi kemanusiaan yang parah, yaitu saling mengampuni dan saling berjanji. Dua kemungkinan tersebut berakar dalam *tindakan*, dan tindakan identik dengan memulai sesuatu baru. Jika suatu bangsa tidak belajar menempuh

dua kemungkinan ini, sejarah kelam masa lalu bakal tetap merupakan kerikil tajam dalam perjalanan kehidupan bersama sebagai satu bangsa.***

Daftar Rujukan

- Aharony, Michal, Über das Lager – Die Vernichtung des Menschen als Menschen in der Totalen Herrschaft, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung, Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien Verlag, 2013, hlm.95-118.
- Arendt, Hannah, *Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen*. München: Piper Verlag, 1986.
- _____, *Asal-Usul Totalitarisme, Jilid I: Antisemitisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- _____, *Asal-Usul Totalitarisme, Jilid II: Imperialisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- _____, *Asal-Usul Totalitarisme, Jilid III: Totalitarisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- _____, *Denken ohne Geländer: Texte und Briefe*. Herausgegeben von Heidi Bohnet und Klaus Stadler. München: Piper Verlag, 2006.
- _____, *Macht und Gewalt*, 8. Auflage, München: Piper Verlag, 1993.
- _____, *Vita Activa oder Vom tätigen Leben*, 7. Auflage der Neuausgabe, München: Piper Verlag, 1992.
- _____, *Was ist Politik?* Aus dem Nachlas hrsg. von Ursula Ludz, München: Piper Verlag, 1993
- _____, *Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I*, hrsg. von Ursula Ludz, München: Piper Verlag 1994.
- Baehr, Peter, *Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences*, Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Brakel, Alexander *Der Holocaust. Judenverfolgung und Völkermord*, Berlin-Brandenburg: Be.Bbra Verlag, 2008.
- Buckler, Steve, *Hannah Arendt and Political Theory. Challenging the Tradition*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- Canovan, Margaret, *Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Förster, Jürgen, Souveränität als Fiktion – Arendts Kritik an einem antipolitischen Konzept der Politik, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung, Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013, hlm.207-231.

- Hardiman, F. Budi, *Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Ionescu, Dana & Salzborn, Samuel, Antisemitismus, Nation und Ordnung Theoretische, historische und empirische Aspekte bei Hannah Arendt, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung, Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013, 17-42.
- Meyer, Katrin, Ordnung jenseits von Souveränität. Arendts Verständnis demokratisch geteilter Macht, dalam: J. Schulze Wessel et al. (Hrsg.), *Ambivalenzen der Ordnung, Staat – Souveränität – Nation*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013, hlm.235-257.
- Möll, Marc-Pierre, *Gesellschaft und totalitäre Ordnung: Eine theoriegeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus*, Baden-Baden: Nomos Verlag, 1998.
- Schwan, Gesine, Die Macht der Gemeinsamkeit, dalam: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 39/2006, hlm.3-7
- Sontheimer, Kurt, *Hannah Arendt. Der Weg einer großen Denkerin*, München: Piper Verlag, 2005.